

**KESEJAHTERAAN KTH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI KOMPARATIF SKEMA HKM DAN HD DI LAMPUNG
SELATAN)**

(Skripsi)

Oleh

**FATONI AZIZ
NPM. 2116041103**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KESEJAHTERAAN KTH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI KOMPARATIF SKEMA HKM DAN HD DI LAMPUNG
SELATAN)**

**Oleh
FATONI AZIZ**

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KESEJAHTERAAN KTH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KOMPARATIF SKEMA HKM DAN HD DI LAMPUNG SELATAN)

Oleh

FATONI AZIZ

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pembangunan berkelanjutan antara anggota kelompok tani hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel penelitian berjumlah 73 responden, terdiri atas 40 anggota KTH Rangai Sejahtera (HKm) dan 33 anggota LPHD Way Kalam (HD), yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Variabel dalam penelitian ini meliputi pembangunan berkelanjutan yang diukur melalui *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). Hasil analisis menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney U-Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara Skema Hutan Kemasyarakatan dan Skema Hutan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KTH Rangai Sejahtera memiliki komoditas Utama yaitu Pala yang hamper merata di setiap lahan garapan dan memiliki Produk turunan dari Pala, sementara LPHD Way Kalam unggul dalam pengelolaan sosial dan adanya jasa ekowisata yaitu Air Terjun Way Kalam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas dan akses pasar bagi kedua kelompok untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara optimal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kesejahteraan masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

WELFARE OF FOREST FARMER GROUPS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (A COMPARATIVE STUDY OF THE HKM AND HD SCHEMES IN SOUTH LAMPUNG)

By

FATONI AZIZ

This study aims to compare sustainable development between members of forest farmer groups under the Community Forestry (HKm) and Village Forest (HD) schemes in improving community welfare in South Lampung Regency. The research uses a quantitative approach with a comparative method. The sample consists of 73 respondents, including 40 members of KTH Rangai Sejahtera (HKm) and 33 members of LPHD Way Kalam (HD), selected using a simple random sampling technique. The variable in this study is sustainable development, measured through the Sustainable Livelihoods Framework (SLF). The analysis results using the non-parametric Mann-Whitney U-Test show a significant difference in sustainable development between the Community Forestry and Village Forest schemes in improving community welfare. KTH Rangai Sejahtera's main commodity is nutmeg, which is evenly cultivated across most of the managed land and has various nutmeg-based derivative products. Meanwhile, LPHD Way Kalam excels in social management and offers ecotourism services, including the Way Kalam Waterfall. This study recommends strengthening capacity and market access for both groups to achieve optimal sustainable development and enhance community welfare.

Keywords: Social Forestry, Community Forestry, Village Forest, Community Welfare, Sustainable Development

Judul Skripsi

: **KESEJAHTERAAN KTH DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI KOMPARATIF SKEMA HKM
DAN HD DI LAMPUNG SELATAN)**

Nama Mahasiswa

: **Fatoni Aziz**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116041103**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.

NIP. 19720918 200212 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

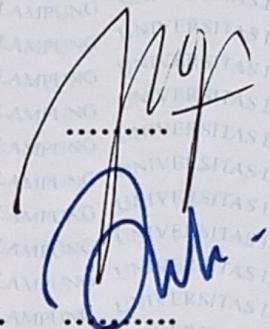
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **6 Agustus 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Fatoni Aziz

NPM. 2116041103

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fatoni Aziz lahir di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 17 April 2002. Penulis merupakan putra ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Ida Rosita. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Tanam Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Poncowarno, kabupaten Lampung Tengah, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Poncowarno, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Provinsi Lampung yaitu Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dengan mengambil Jurusan Administrasi Negara yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Data dan Informasi pada tahun 2022 dan Anggota Rumah Tangga Organisasi pada tahun 2023. Kemudian ditahun yang sama peneliti diberi amanah menjadi Kepala Bidang Kewirausahaan Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP UNILA periode kepengurusan 2023. Pada tahun 2023 Peneliti menjadi Asisten Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (AKP) Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama manjadi Asleb, penulis banyak mengikuti kegiatan kepanitiaan, penelitian dan pengabdian Jurusan Administrasi Negara. Penulis juga ikut melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,

Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada tahun 2024, kemudian ditahun yang sama penulis ikut melaksanakan Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam bidang 4 yaitu Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan.

Lain dari itu, penulis tergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Lampung IMM UNILA sebagai anggota dari komisariat Soshum Unila karena berada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis telah meraih penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Motto

Fastabiqul Khairat (Al-Baqarah:148)

“Berlomba-lomba dalam kebaikan”

Imam Syafi’i

“Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau sesaat, ia akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidup.”

Imam Al-Ghazali:

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.”

KH. Ahmad Dahlan

"Manusia hidup di dunia hanya satu kali. Maka berjuanglah untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat."

Belva Devara

“Jangan buang waktu sedikit pun untuk putus asa, fokus ke apa yang bisa kamu kontrol dan kejar itu gila-gilaan, karena cuman itu yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan”

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, Penulis selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Tanpa bantuan, perlindungan dan pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah Suherman dan Ibu Ida Rosita,

yang selalu memberikan segala cinta, doa, kerja keras, dukungan moril dan materil serta pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu curahkan kepada penulis, Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada hingga karena telah ridho mengizinkan penulis untuk berkuliah di tempat yang jauh dari jangkauan, pandangan serta pengawasan kalian, dan atas kepercayaan yang kalian titipkan dalam setiap langkah penulis menuntut ilmu. Keikhlasan kalian melepas penulis untuk menjemput masa depan adalah bentuk kasih sayang yang begitu besar, yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan yang tiada habisnya.

Kakak-kakak dan Adik Tersayang Abang Hunaifi Ahmadi & Abang Ibnu Sina dan Adikku Nur Rahma Azzahra,

yang selalu memberikan semangat, motivasi dan wejangan serta keritik yang membangun kepada penulis yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil, serta membantu penulis dalam hal apapun.

Paman & Bibi dan Keponakan-Keponakan Ibuku tercinta, Paman Zaki & Bibi Efti dan Reza, Nisa dan Fazra

yang selalu memberikan tempat tinggal serta sekaligus suasana keluarga yang hangat selama di perantauan yang baik untuk penulis, terima kasih telah memberikan semangat yang luar biasa serta kasih sayang yang kepada penulis.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., dengan limpahan karunia, berkat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Kesejahteraan KTH dan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Komperatif pada skema HKM dan HD di Lampung Selatan)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa dijunjung tinggi kepada pemimpin umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini mengalami hambatan dan terdapat berbagai kesalahan, namun atas bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak dan tentunya izin Allah SWT, sehingga hambatan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa studi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak berikan dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Nasihat dan dukungan Bapak telah menjadi pencerah di setiap langkah akademik penulis, serta memberikan motivasi untuk terus berproses dan berkembang secara pribadi maupun ilmiah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemuliaan kepada Bapak atas segala ilmu dan kebaikan yang telah Bapak berikan.
2. Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, atas segala bimbingan, ilmu, kesabaran, serta arahan yang telah Ibu berikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukan Ibu, penulis merasa sangat beruntung karena tetap mendapatkan perhatian, dorongan, dan kesempatan untuk belajar serta memperbaiki diri. Setiap masukan yang Ibu sampaikan menjadi motivasi berharga bagi saya untuk terus memperbaiki kualitas karya ilmiah ini dan menumbuhkan kedewasaan dalam berpikir serta bersikap secara akademik. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan

kepada Ibu atas dedikasi yang luar biasa dalam membimbing mahasiswa seperti penulis.

3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Pd.D., selaku dosen pembahas dan penguji skripsi penulis. Terima kasih atas masukan, kritik, dan saran konstruktif yang Ibu berikan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Setiap tanggapan dan penilaian dari Ibu menjadi bekal penting bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang, baik dalam hal keilmuan maupun kemampuan berpikir kritis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kemuliaan kepada Ibu atas segala ilmu dan kontribusi yang Ibu berikan kepada dunia akademik.
4. Prof. Dra. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Bimbingan dan dedikasi Bapak dan Ibu Dosen telah menjadi pondasi penting dalam membentuk pola pikir, integritas, serta semangat akademik peneliti sebagai mahasiswa. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, serta mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas bantuan, pelayanan dan dukungan administrasi yang telah diberikan kepada penulis dari awal masa studi sampai penyelesaian skripsi penulis. Semoga segala kebaikan Mbama staf Jurusan senantiasa diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.
8. Informan Penelitian yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk berpartisipasi dalam proses penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, masukan, informasi, dan saran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan lebih baik dan mendalam. Partisipasi dan keterbukaan yang diberikan menjadi kontribusi berharga dalam menyusun karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal.

9. Terima kasih untuk Deajeng Putri Azahra, Dita Nur Fattisya, Nadia Zahara Balqis dan Aristi Ashridewanti. Atas kebersamaan, semangat dan canda tawa yang telah mewarnai hari-hari perjuangan dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan masa studi kuliah penulis. Terima kasih sudah menemani penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga semua harapan dan doa serta cita-cita yang diupayakan dapat terwujud di masa depan. Sampai bertemu dan berjumpa lagi di waktu dan tempat lain.
10. Teman-teman Fans Julianto Shafwan, Agung, Vivi, Ruweisa, Pinka, There, Amel, C. Dian, Dwi Julian, Muti, Silvia, dan Bima. Terima kasih atas persahabatan unik, dukungan, dan momen kebersamaan yang selalu menghibur dan menguatkan, baik di tengah tekanan akademik maupun dalam suka cita perjuangan kuliah. Terima kasih sudah menemani penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga member FJ selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengapai cita-cita, dan terus semangat dalam mencapai dan mengejar kesuksesan di masa depan.
11. Teman-teman Gilgamara Angkatan 2021, Algih, Pachri, Satriono, Nopal, Reja, Velly, Wulandari, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita dan makna. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga keluarga yang selalu memberi semangat dan inspirasi. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan seluruh tujuan hidup kalian dapat diraih dengan kemudahan dalam mengejar cita-cita kalian di masa depan.
12. Teman-teman Magang Dishut 2024, Elfani Rachel, Indy Shafira, Putri Wulandari, Agusni Reza, Alya Nazla. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, dan pengalaman berharga selama menjalani magang. Ilmu

dan pengalaman yang kita raih bersama menjadi bagian penting dari proses pembelajaran untuk penulis. Semoga pengalaman ini menjadi pijakan yang kuat bagi kita semua untuk menapaki masa depan yang gemilang dan sesuai dengan harapan.

13. Teman-teman Pimpinan dan Keluarga Besar UKM-F FSPI Fisip Universitas Lampung, Bima, Mustika, Imran, Cindy, Hafis, Agung, Resna, Faris, Vivi, Dwi, Diajeng, Nimas dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kepercayaan, kerja kolektif, dan dedikasi bersama dalam menjalankan roda organisasi. Pengalaman ini telah melatih penulis menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam berpikir. Semoga perjuangan kita di FSPI menjadi amal kebaikan dan bekal untuk mewujudkan cita-cita luhur masing-masing.
14. Kawan-kawan Ikatan Mahasaiwa Muhammadiyah IMM Universitas Lampung, Kak Leyon, kak Faried, kak Alfinto, kak Tahta, Fatih, Diajeng, Afra, Annisa, Efti, Jia, Fandi. Terima kasih atas kebersamaan dalam ruang-ruang dakwah, diskusi, dan pengkaderan. IMM telah menjadi tempat tumbuh dan belajar, serta membentuk semangat keilmuan dan pengabdian dalam diri saya. Semoga IMM terus menjadi ladang perjuangan yang melahirkan generasi unggul, dan semoga seluruh cita-cita kalian diridai dan dikabulkan oleh Allah SWT.
15. *Dear Me, Myself, and I*, Terima kasih kepada diriku sendiri, yang telah bertahan dalam setiap tekanan, mengatasi rasa lelah, dan terus melangkah meski sering merasa ragu. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, walau terkadang jalan terasa berat dan penuh tantangan. Terima kasih karena telah berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan rumah dan keluarga demi menuntut ilmu dan memperjuangkan cita-cita. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku telah melaluinya satu per satu dengan ketekunan, keyakinan, dan doa. Semoga aku terus diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II . TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	13
2.3 Konsep Kesejahteraan	17
2.3.1 Kesejahteraan Sosial.....	19
2.3.2 Kesejahteraan Ekonomi.....	20
2.3.3 Kesejahteraan Subjektif.....	21
2.4 Program Perhutanan Sosial	24
2.4.4 Skema Perhutanan Sosial.....	24
2.4.5 Pengelolaan dan Pemanfaatan Perhutanan Sosial.....	25
2.5 Kerangka Pikir	26
III . METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian.....	28
3.2 Waktu dan Tempat	28
3.3 Alat dan Objek Penelitian	29
3.4 Populasi dan Pengambilan Sample	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.6 Studi Pustaka	32

3.5.7 Wawancara	32
3.6 Variabel Penelitian	33
3.7 Hipotesis Penelitian.....	33
3.8 Definisi Konsep dan Operasi Variabel.....	34
3.9 Validitas dan Reliabilitas	37
3.9.1 Uji Validitas.....	37
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	39
3.10 Teknik Analisis Data.....	40
3.10.1 Uji Normalitas	41
3.10.2 Uji Homogenitas.....	41
3.10.3 Uji Independent Sample t-Test.....	42
3.10.4 Uji Nonparametris	42
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Kelompok Tani Hutan Rantai Sejahtera	45
4.1.2 Lembaga Pengelola Hutan Desa Way Kalam.....	47
4.2 Karakteristik Responden	50
4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	51
4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	52
4.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
4.2.4 Karakteristik Responden berdasarkan Luas Lahan Garapan	54
4.3 Hasil Penelitian	55
4.3.1 Uji Normalitas	55
4.3.1 Uji Hipotesis.....	57
4.4 Pembahasan Penelitian.....	66
4.4.1 Pembahasan Pembangunan Berkelanjutan	67
4.4.2 Pembahasan Hipotesis	84
4.4.3 Kontribusi skema dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.	87
V SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 KESIMPULAN	92
5.2 SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera dan KTH Limau Kunci	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3. Pernyataan <i>Satisfaction with Life Scale (SWLS)</i>	22
Tabel 4. Jumlah sample di LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera	30
Tabel 5. Bobot Kreteria Jawaban Skala Likert	33
Tabel 6. Definisi Konsep	34
Tabel 7. Oprasional Variabel	35
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pembangunan berkelanjutan	38
Tabel 9. Uji Realibilitas pada variabel Pembangunan Berkelanjutan	39
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas variabel Pembangunan Berkelanjutan	56
Tabel 11 Uji Mann- Whitney U-Test Ranks	57
Tabel 12. Uji Mann-Whitney U-Test statistics	58
Tabel 13. Perbedaan Pernyataan Dimensi Modal Alam	60
Tabel 15. Pernyataan dari dimensi Modal Fisik	61
Tabel 16. Pernyataan dari Dimensi Modal Finansial	63
Tabel 17. Pernyataan dari Dimensi Modal Manusia	64
Tabel 18. Pernyataan dari Dimensi Modal Sosial	65
Tabel 14. Pemanfaatan kawasan Hutan kedua skema	69
Tabel 19. Tabel perbandingan hubungan external LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Jumlah Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Provinsi Lampung.....	3
Gambar 2. Jumlah Nilai Transaksi Ekonomi KTH Rangai Sejahtera dan LPHD Way Kalam	4
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4. Struktur Organisasi KTH Rangai Sejahtera	45
Gambar 5. Struktur Organisasi LPHD Way Kalam	48
Gambar 6. Diagram Batang Pendidikan Terakhir	51
Gambar 7 Diagram Usia Responden.....	52
Gambar 8. Diagram Batang Jenis Kelamin.....	53
Gambar 9. Diagram Batang Luas Lahan Garapan	54

DAFTAR SINGKATAN

HKM	Hutan Kemasyarakatan
HD	Hutan Desa
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
LPHD	Lembaga Pengelola Hutan Desa
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
NTE	Nilai Transaksi Ekonomi
KLHK	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTH	Kelompok Tani Hutan
HHBK	Hasil Hutan Bukan kayu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di pulau-pulau seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua, sehingga Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan hutannya (Emanuella, 2024). Dampak keberadaan hutan tidak terlepas dari fungsi hutan yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Salah satu fungsi hutan dari ekologi seperti untuk resapan air, mencegah bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan sebagai penyerap karbon dioksida yang tinggi (Herutomo & Istiyanto, 2021). Dari fungsi hutan tersebut menunjukkan keberadaan hutan membawa dampak positif bagi manusia maupun lingkungan.

Salah satu dampak lingkungan yang negative dari kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu fenomena deforestasi. Deforestasi merupakan kegiatan penebangan kayu yang ada di hutan yang dimanfaatkan secara komersial. Fenomena deforestasi ini disebabkan oleh keterbatasan akses lahan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan (Laksemi *et al.*, 2019). Kegiatan masyarakat lokal yang ingin memenuhi kebutuhan kehidupan mereka memiliki tantangan dengan adanya keterbatasan lahan, maka masyarakat melakukan eksploitasi pohon-pohon yang ada di kawasan hutan. Keterbatasan lahan ini yang mendorong masyarakat lokal memasuki kawasan hutan dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa memiliki perizinan yang baku dari pemerintah (Laksemi *et al.*, 2019).

Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2016), pemanfaatan hutan oleh masyarakat menimbulkan permasalahan signifikan, terutama di 25.863 desa di kawasan hutan, di mana 71,06% masyarakatnya bergantung pada sumber

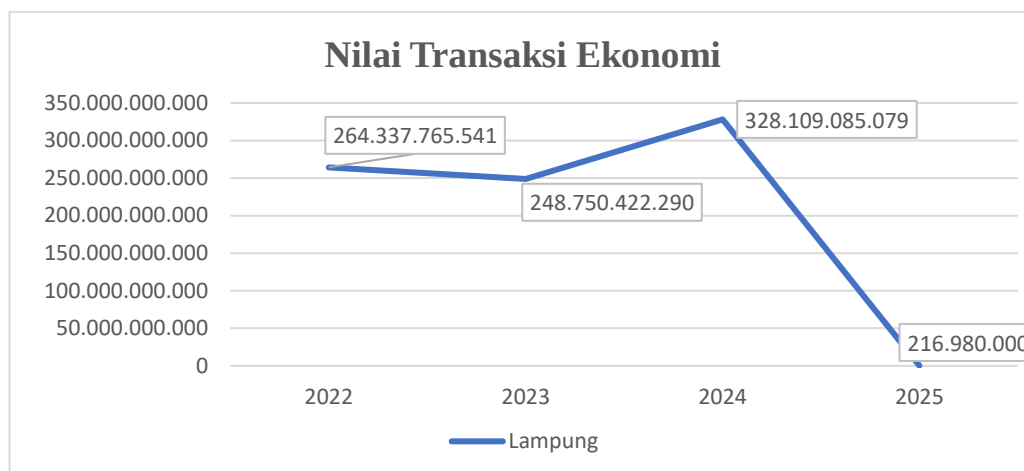
daya hutan, namun sebanyak 10,2 juta orang (36,73%) tergolong miskin. Kondisi sosial dan ekonomi bertambah sulit untuk masyarakat lokal di mana mengakses hutan sering menimbulkan konflik, salah satunya konflik agraria yang pada periode 2004-2015 terdapat 1.772 konflik agraria di kawasan hutan sehingga kebanyakan masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak memiliki akses legalitas terhadap sumber daya hutan.

Fenomena deforestasi dan akses legalitas pada kawasan hutan memunculkan konsep Perhutanan Sosial atau *social forestry*. Di Indonesia, konsep Perhutanan Sosial telah diterapkan sejak tahun 1989 dengan berbagai bentuk. Saat ini, konsep Perhutanan Sosial di Indonesia diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Tujuan dari Perhutanan Sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan program pemberdayaan kepada masyarakat namun tetap berpedoman pada prinsip kelestarian hutan (Hasan & Niapele, 2022).

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2024), program Perhutanan Sosial tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini berkontribusi dalam berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, kesetaraan gender, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan perubahan iklim. Dengan beragam kontribusi tersebut, program Perhutanan Sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Implementasi program Perhutanan Sosial di Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (2024), capaian akses perizinan legalitas kawasan hutan dalam Program Perhutanan Sosial telah mencapai 6.858.606,10 hektar untuk luas kawasan hutan dan di Provinsi Lampung capaian akses perizinan telah mencapai 234,707,79 hektar untuk luas kawasan hutan dengan melibatkan 89.040 kepala keluarga. Di Provinsi Lampung, terdapat empat skema dalam implementasi program Perhutanan Sosial, yaitu skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemitraan. Dua contoh kelompok tani yang mendapatkan akses perizinan Perhutanan Sosial adalah

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam dan Kelompok Tani Hutan Rangai Sejahtera.



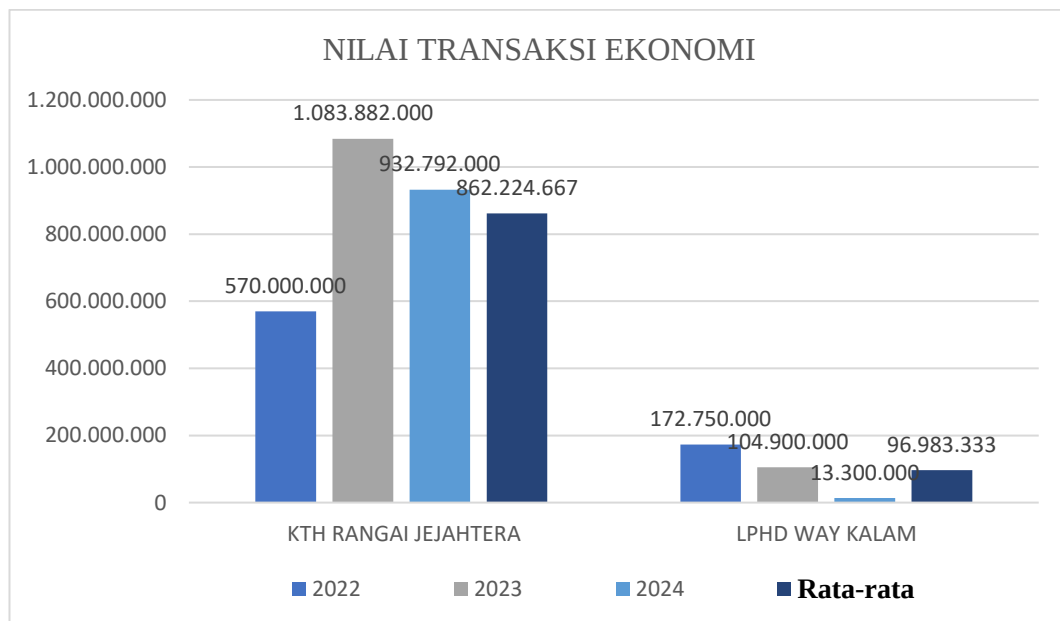
Gambar 1. Jumlah Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Provinsi Lampung

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh KLHK (2025)

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa hingga tahun 2025, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang tercatat di Provinsi Lampung telah mencapai 216.980.000, sebagaimana dilaporkan dalam melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMLUH KLHK) pada 2 Februari 2025. Provinsi Lampung pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan capaian tertinggi ke tiga di Indonesia sebagai provinsi terbanyak yang melaporkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2024).

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah (2024), capaian NTE merupakan dukungan pemerintah melalui Penyuluh Kehutanan dalam pembangunan kehutanan untuk upaya memandirikan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan mensejahterakan anggota dan keluarganya. NTE ini berasal dari berbagai kegiatan seperti jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimal dan adil, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan (A.E. et al., 2016).

Program Perhutanan Sosial yang memiliki berbagai macam pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat terlihat dampak dari segi ekonomi dari pencatatan Nilai Transaksi Ekonominya, menurut Supriatna *et al*, (2024) Tujuan dari Program Perhutanan Sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan. Nilai Transaksi Ekonomi ini tercatat dari adanya aktifitas ekonomi Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial dari berbagai skema.



Gambar 2. Jumlah Nilai Transaksi Ekonomi KTH Rangai Sejahtera dan LPHD Way Kalam

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh KLHK (2025)

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa kedua kelompok tani hutan ini yaitu KTH Rangai Sejahtera dan LPHD Way Kalam mempunyai aktifitas ekonomi melalui catatan Nilai Tansaksi Ekonomi (NTE) dari pemanfaatan kawasan hutan, namun, mempunyai perbandingan nilai Rata-rata yang berbeda dalam tiga tahun terakhir. Rp. 862.224.667 untuk rata-rata NTE KTH Rangai Sejahtera dan Rp. 96.983.333 untuk rata-rata NTE LPHD Way Kalam.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Way Kalam merupakan lembaga desa yang memperoleh legalitas melalui skema Hutan Desa untuk mengelola kawasan hutan. Berdasarkan wawancara pada 15 Oktober 2024 dengan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Way Kalam, Masdira Tiandy, Kelompok Tani Hutan Way Kalam

memiliki berbagai usaha turunan dari pengelolaan hutan, di antaranya: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tani Mulya Kopi, KUPS Sadar Wisata dengan destinasi Air Terjun Way Kalam, KUPS Lebah Madu, KUPS Sumber Rejeki yang bergerak di bidang peternakan kambing, serta KUPS Gula Aren. Beragam usaha ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Way Kalam, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sehingga tercatat dalam Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) sebagai hasil pemanfaatan kawasan hutan.

Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Way Kalam meraih berbagai prestasi, termasuk Juara 1 Wana Lestari Nasional 2022 dan masuk 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021–2023. Sebanding dengan prestasi LPHD Way Kalam menurut Ketua LPHD, Masdira Tiandy dari hasil wawancara pada tanggal 15 oktober 2024, tantangan tetap ada, seperti pengelolaan desa wisata yang belum optimal dalam menampilkan budaya khas, keterbatasan teknologi digital, kurangnya sarana prasarana, dan minimnya regenerasi SDM untuk pengelolaan berkelanjutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera mengelola kawasan hutan lindung Register 17 seluas 420 ha melalui skema Hutan Kemasyarakatan, dengan mayoritas anggota menanam pala sebagai sumber pendapatan utama. Pala, rempah asli Indonesia yang merupakan tanaman *MultiPurpose Tree Species* (MPTS), menjadi komoditas unggulan untuk ekspor (Parliansyah dkk, 2019) Oleh karena itu tanaman MPTS menjadi hasil pemanfaatan hutan yang tercatat dalam NTE dari KTH ini. Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera berupaya menjadi sentra pala, mencakup tanaman hingga produk turunannya. Kelompok ini juga memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sirup Pala yang mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui produksi minuman berbahan pala menurut M. Yusuf Amrulloh Bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera saat wawancara pada tanggal 22 oktober 2024.

KTH Rangai Sejahtera berkolaborasi dengan Yayasan pusat informasi lingkungan Indonesia Green Network, Gojek, dan Jejak.in melakukan penanaman belasan ribu pohon jenis *MultiPurpose tree Species* (MPTS) (pala, nangka, durian, alpukat, dan

petai). Tujuannya adalah menjaga kelestarian hutan lindung dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dari hasil wawancara pada tanggal 22 oktober 2024 dengan Bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera, M. Yusuf Amrulloh, hasil dari kolaborasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, di mana bibit pohon yang telah berbuah nantinya akan digunakan kembali untuk penanaman atau dijual sebagai bibit pohon baru. Akan tetapi, KTH Rangai Sejahtera juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensi hutan mereka. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas untuk promosi dan *branding* produk hasil hutan seperti pala, kurangnya sarana penunjang kegiatan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengatasi penyakit yang menyerang tanaman pala.

Tabel 1. Perbedaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera dan KTH Limau Kunci

NO	Kriteria	KTH Rangai Sejahtera	KTH Limau Kunci
1	Perizinan	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
2	Nomor Surat Keputusan	No. SK.2848/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018	SK.1644/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017
3	Nomor Registrasi	18/01/08/2019/KTH.1063/2019	18/01/09/2013/KTH.0171/2017
4	Alamat	Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Lampung	Desa Way Kalam, Kec. Panengahan, Kab. Lampung Selatan, Lampung
5	Ketua	Bapak Adi Suherman	Bapak Masdira
6	Kelas	Utama	Pemula
7	Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

(Sumber: Diolah oleh peneliti 2025)

Berdasarkan tabel diatas Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahteran dan KTH Limau Kunci yang tergabung dalam LPHD Way Kalam masuk kedalam kelas Utama dan Pemula. Berdasarkan peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tetang Pedoman Kelompok Tani Hutan diklasifikasikan ke dalam tiga kelas, yaitu pemula, madya, dan utama, Penilaian ini didasarkan pada tiga aspek utama: kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Salah satu contoh KTH yang telah mencapai kelas utama adalah KTH Rangai Sejahtera, yang memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat, kawasan yang dikelola dengan baik, serta usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Sebaliknya, KTH Limau Kunci masih berada dalam kategori pemula, yang menunjukkan bahwa kelompok ini masih dalam tahap awal pengelolaan. Oleh karena itu, KTH ini membutuhkan lebih banyak pendampingan dan penguatan kapasitas agar dapat berkembang menjadi kelompok tani hutan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Perbedaan tingkat kelas ini menunjukkan bahwa setiap KTH memiliki dinamika yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pembinaan, modal usaha, serta keterlibatan anggota dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Menurut Goa dkk (2024) dalam penelitiannya, kecukupan dana menjadi faktor pendorong keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan, sebagaimana yang di temukan dalam studi pada KTH Tamputuk Cipta Sejahtera. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zeilika *et al.*, (2021). Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kawasan hutan maka semakin besar pengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial petani dalam skema HKm, seperti yang terjadi pada Gapoktan Mandiri Lestari.

Di Provinsi Lampung, program ini diimplementasikan melalui LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera. LPHD Way Kalam mengembangkan ekowisata berbasis integritas ekosistem dan produk turunan seperti kopi dan gula aren untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, KTH Rangai Sejahtera fokus pada pengelolaan pala sebagai hasil hutan bukan kayu, yang menjadi sumber pendapatan utama. Kolaborasi mereka dalam reforestasi menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan ekosistem sambil menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Meskipun manfaatnya besar, tantangan seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan akses pemasaran, minimnya pemanfaatan teknologi, dan kurangnya pengetahuan pengelolaan, termasuk pengendalian penyakit tanaman, masih menjadi hambatan. Tantangan ini perlu

diatasi untuk mengoptimalkan potensi program Perhutanan Sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki luas hutan tropis yang signifikan, yang memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah Program Perhutanan Sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Di Provinsi Lampung, terdapat dua skema utama dalam Program Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). HKm memberikan akses legal kepada kelompok tani untuk memanfaatkan hasil hutan, sementara HD dikelola oleh lembaga desa untuk kepentingan masyarakat desa secara lebih luas. Meskipun kedua skema bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum banyak penelitian yang secara langsung membandingkan efektivitas keduanya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh kelompok tani dalam masing-masing skema menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, namun dampaknya terhadap kesejahteraan anggota kelompok tani hutan belum terukur dengan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komparatif terhadap pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dua skema Perhutanan Sosial ini. LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera dipilih sebagai objek penelitian untuk merepresentasikan kedua skema yang berada di kabupaten Lampung selatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kesejahteraan Kth Dan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Komparatif Skema Hkm Dan Hd Di Lampung Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

- 2) Bagaimana kontribusi masing-masing skema terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis perbedaan anggota kelompok tani hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF)
- 2) Mengidentifikasi kontribusi masing-masing skema dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait program Perhutanan Sosial. Temuan penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai: Perbedaan kesejahteraan masyarakat berdasarkan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), hubungan antara pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) dan implementasi program perhutanan sosial.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, yaitu:

- a) Untuk Pemerintah dan pembuat kebijakan: Memberikan dasar empiris untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan manfaat Perhutanan Sosial bagi kesejahteraan masyarakat.
- b) Untuk kelompok tani hutan: Memberikan informasi mengenai skema yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berbasis hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang penting bagi penelitian dalam membuat kajian komprehensif, serta dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Penelitian telah menemukan beberapa karya penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa. Penelitian-penelitian ini menjadi referensi utama dalam memperdalam pemahaman konsep serta teori yang mendasari penelitian penulis. Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Yosafat Naparin Helmi (2024)	Pengaruh Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Di Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan kelompok tani hutan di Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat. Hal ini didasarkan pada nilai T (2.953) dan P (0.003), yang mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi program, semakin baik pula dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok tani hutan.
Helen Yuseva Ayu, (2024)	Penilaian Dampak Hutan Kemasyarakatan Melalui <i>Sustainable Livelihoods Framework</i>	penelitian ini menunjukkan bahwa program Program HKm memberikan dampak positif yang signifikan pada lima jenis modal penghidupan masyarakat Modal Alam (<i>Natural Capital</i>), Modal Manusia (<i>Human Capital</i>), Modal Finansial (<i>Financial Capital</i>), Modal Sosial (<i>Social Capital</i>), Modal Fisik (<i>Physical Capital</i>). Program HKm berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

		perubahan signifikan pada berbagai modal penghidupan. Strategi penghidupan yang berkelanjutan mengarah pada pengoptimalan aset-modal ini untuk mendukung kebutuhan hidup jangka panjang.
Emanuella Lusua Sulo Nixon Roni (2024)	Efektivitas Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan Kehutanan Pada Kelompok Tani Hutan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Sisimeni Sanam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.	Hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan Kehutanan menunjukkan beberapa temuan penting terkait aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dari kelompok tani hutan yang terlibat di kawasan KHDTK Sisimeni Sanam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Aspek ekologi dalam program ini kurang efektif tekanan pada kawasan hutan karena perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat. Aspek ekonomi dalam program ini berjalan efektif secara ekonomi karena Pendapatan dari program ini berkontribusi 85% terhadap pendapatan total para anggota kelompok tani hutan.
Zeilika Kaskoyo Wulandari (2021)	Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi)	Hasil penelitian yaitu Partisipasi petani dalam perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi, sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pemanfaatan hasil hutan juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani, baik ekonomi maupun sosial.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat temuan yaitu Program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara konsisten menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun modal penghidupan. Pemanfaatan hasil hutan, partisipasi dalam pengelolaan, dan kontribusi pendapatan merupakan faktor utama yang memengaruhi kesejahteraan anggota kelompok tani. Namun, beberapa aspek, seperti efektivitas ekologi, masih memerlukan perhatian lebih dalam penelitian skema perhutanan sosial.

Sejumlah penelitian telah meneliti dampak program Perhutanan Sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Goa *et al.*, (2024) menemukan bahwa program Hutan Kemasyarakatan (HKm) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan kelompok tani hutan, yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya hutan. Namun, penelitian ini tidak membandingkan dengan skema Hutan Desa (HD) sehingga tidak dapat menyimpulkan apakah HKm lebih efektif dibandingkan skema lainnya.

Ayu *et al.*, (2022) menggunakan kerangka Sustainable Livelihoods Framework (SLF) untuk menilai dampak program HKm terhadap lima jenis modal penghidupan masyarakat (modal alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik). Hasilnya menunjukkan bahwa program HKm meningkatkan modal finansial dan sosial, tetapi belum menjelaskan bagaimana perbedaan ini terjadi dibandingkan skema lain seperti Hutan Desa. Zeilika *et al.*, (2021) menemukan bahwa partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Namun, penelitian ini hanya fokus pada satu skema tanpa mempertimbangkan bagaimana perbandingan kesejahteraan antara skema HKm dan HD.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada studi yang secara langsung membandingkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani dalam skema HKm dan HD menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihoods Framework (SLF) untuk menilai kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kedua skema Perhutanan Sosial.

2.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Salim (2010), untuk membuat kerangka pembangunan maka diperlukan kerangka dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam program perhutanan sosial yang berkaitan pengelolaan sumberdaya alam dalam pemanfaatan kawasan hutan. Maka pembangunan berkelanjutan tidak bisa terlepas dari kerangka penghidupan berkelanjutan atau *Sustainable Livelihood Framework*. Menurut Chambers dan Conway dalam Scoones, (1998) *Sustainable Livelihood* mencakup kemampuan aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian dikatakan berkelanjutan apabila mampu menghadapi tekanan dan guncangan, menjaga atau meningkatkan kapasitas serta modal yang dimiliki, tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam buku *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis* karya Ian Scoones, 1998 *Sustainable Livelihood* dibagi menjadi empat jenis modal. Kemampuan untuk menjalankan berbagai strategi mata pencaharian bergantung pada modal dasar yang bersifat material maupun sosial, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, yang dimiliki oleh individu. Berikut adalah empat jenis modal tersebut:

- a) Modal Alam (*Natural Capital*) merupakan cadangan sumber daya alam seperti tanah, air, udara, dan sumber daya genetik, serta layanan lingkungan seperti siklus hidrologi dan penyerap polusi. Modal ini menjadi sumber aliran sumber daya dan layanan yang mendukung keberlangsungan penghidupan.
- b) Modal Ekonomi atau Finansial (*Financial Capital*) mengacu pada dasar modal yang meliputi uang tunai, kredit atau utang, tabungan, dan modal ekonomi

lainnya. Termasuk di dalamnya adalah infrastruktur dasar, peralatan produksi, dan teknologi yang esensial untuk menjalankan berbagai strategi mata pencaharian.

- c) Modal Manusia (*Human Capital*) terdiri dari keterampilan, pengetahuan, kemampuan bekerja, kesehatan, dan kapasitas fisik yang baik. Modal ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan berbagai strategi penghidupan.
- d) Modal Sosial (*Social Capital*) meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, klaim sosial, hubungan antarindividu, afiliasi, dan asosiasi. Modal ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam menjalankan strategi mata pencaharian yang membutuhkan tindakan terkoordinasi.

Kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan atau *sustainable livelihoods framework* diadaptasi juga oleh Department For Internasional Development (DFID), DFID adalah departemen pemerintah Inggris yang bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Chambers dan Conaway dalam DFID (1999) menyatakan bahwa Kerangka modal mata pencaharian berkelanjutan merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghidupan masyarakat. Pentagon modal yang terletak di jantung analisis mata pencaharian terdiri dari lima jenis modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal finansial. Kelima modal ini merupakan faktor utama dalam menentukan strategi dan hasil mata pencaharian suatu komunitas. Berikut adalah pentagon asset lima jenis modal tersebut:

- a) Modal Manusia (*Human Capital*). Modal manusia adalah mencakup keterampilan, pengetahuan, kemampuan bekerja, dan kesehatan yang baik yang secara bersama-sama memungkinkan individu untuk menjalankan berbagai strategi mata pencaharian dan mencapai tujuan penghidupan. Pada tingkat rumah tangga, modal manusia bergantung pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia, yang dapat dipengaruhi oleh ukuran rumah tangga, tingkat keterampilan, potensi kepemimpinan, serta status kesehatan individu. Modal manusia juga dapat dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Banyak orang

melihat kesehatan yang buruk atau kurangnya pendidikan sebagai dimensi inti dari kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan modal manusia sering kali menjadi bagian dari strategi utama untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

- b) **Modal Sosial (*Social Capital*)** Modal sosial merujuk pada sumber daya sosial yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mata pencaharian mereka. Modal sosial dapat berkembang melalui beberapa mekanisme utama, seperti: Jaringan dan keterhubungan baik secara vertikal (pelindung/*klien*) maupun horizontal (antarindividu dengan kepentingan bersama) yang meningkatkan kepercayaan dan kerja sama serta memperluas akses ke lembaga yang lebih luas. Keanggotaan dalam kelompok formal, yang sering kali memerlukan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati bersama. Hubungan kepercayaan dan pertukaran timbal balik, yang memfasilitasi kerja sama dan mengurangi biaya transaksi dalam interaksi ekonomi. Keberadaan modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efisiensi hubungan ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan serta tingkat tabungan masyarakat.
- c) **Modal Alam (*Natural Capital*)** Modal alam mencakup stok sumber daya alam yang menyediakan aliran manfaat bagi mata pencaharian, seperti tanah, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Hubungan antara modal alam dan konteks kerentanan sangat erat, karena banyak guncangan yang menghancurkan mata pencaharian masyarakat miskin berakar pada degradasi sumber daya alam.
- d) **Modal fisik** mencakup infrastruktur dasar dan alat produksi yang mendukung penghidupan masyarakat. Beberapa komponen utama modal fisik antara lain: Transportasi yang terjangkau Tempat tinggal yang layak. Pasokan air dan sanitasi yang memadai. Energi yang bersih dan terjangkau. Akses terhadap informasi dan komunikasi. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang serta menghambat akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

e) Modal finansial mencerminkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi individu atau komunitas untuk mencapai tujuan penghidupan mereka. Modal ini dapat berasal dari:

1. Stok finansial yaitu tabungan dalam bentuk uang tunai, simpanan bank, atau modal likuid seperti ternak dan perhiasan.
2. Arus keuangan reguler: Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, pensiun, bantuan sosial, atau kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di tempatlain.

Modal finansial merupakan bentuk modal yang paling fleksibel, karena dapat dikonversi ke dalam berbagai jenis modal lainnya. Namun, modal ini sering kali menjadi yang paling sulit diakses oleh masyarakat miskin, sehingga mereka lebih bergantung pada bentuk modal lainnya dalam menjalankan strategi mata pencaharian.

Mata pencaharian dikatakan berkelanjutan apabila memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, tidak bergantung pada dukungan luar secara berlebihan, menjaga produktivitas sumber daya alam dalam jangka panjang, dan tidak mengorbankan mata pencaharian orang lain. Keberlanjutan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama:

1. Keberlanjutan lingkungan: Menjaga produktivitas sumber daya alam agar tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.
2. Keberlanjutan ekonomi: Memastikan bahwa tingkat pengeluaran dan pendapatan yang layak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
3. Keberlanjutan sosial: Meminimalkan pengucilan sosial dan memaksimalkan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya.
4. Keberlanjutan kelembagaan: Memastikan bahwa struktur dan proses yang mendukung penghidupan dapat terus berfungsi secara efektif dalam jangka panjang.

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat relevan dalam analisis mata pencaharian, karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan mempertimbangkan

keberlanjutan dalam strategi mata pencaharian, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan (Brundtland, 2017). Dalam konteks Perhutanan Sosial, pembangunan berkelanjutan diukur melalui:

1. Keberlanjutan ekonomi: Pendapatan dari pemanfaatan hasil hutan, diversifikasi usaha, dan akses terhadap pasar.
2. Keberlanjutan sosial: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, kesejahteraan subjektif, dan hubungan sosial dalam kelompok tani.
3. Keberlanjutan lingkungan: Konservasi hutan, penggunaan sumber daya yang lestari, dan dampak ekologis dari kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, pembangunan berkelanjutan akan diukur menggunakan *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) yang mencakup lima modal utama: modal alam, modal finansial, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik (Scoones, 1998). Selain itu, kerangka ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar penelitian, terutama dalam menilai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kedua skema perhutanan sosial berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok tani hutan secara berkelanjutan.

2.3 Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang merasa hidupnya sejahtera. Kata sejahtera sendiri mengandung makna aman, sentosa, makmur, dan selamat dari gangguan serta kesukaran. Selain itu, kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai tata kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi rasa keselamatan dan

ketenteraman diri, di mana setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya.

Menurut Midgley (1995) kesejahteraan adalah keadaan di mana tingkat kehidupan sosial yang berbeda dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka serta menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam konsep modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang layak dikonsumsi serta memperoleh kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang memadai (Putri dan Marasabessy, 2023)

Kesejahteraan merupakan kondisi yang sangat diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seluruh kebutuhan manusia terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan pakaian, hingga kebutuhan akan pengakuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi faktor mendasar yang memungkinkan seseorang merasakan kesejahteraan (Darmawan & Risnawati, 2020).

Menurut Hahnel & Albert (1990) dalam Darmawan & Risnawati (2020) teori kesejahteraan secara umum terbagi menjadi tiga aliran utama, yaitu pendekatan utilitarian klasik, teori kesejahteraan neoklasik, dan pendekatan kontraksi baru. Pendekatan utilitarian klasik berfokus pada pengukuran dan peningkatan kepuasan atau kebahagiaan individu, dengan prinsip bahwa setiap orang berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan dirinya, sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama. Sementara itu, teori kesejahteraan neoklasik memandang kesejahteraan sebagai fungsi dari total kepuasan individu dalam masyarakat. Perkembangan teori kesejahteraan sosial selanjutnya melahirkan pendekatan kontraksi baru, yang menekankan pada kebebasan individu untuk menentukan dan mengejar kebutuhan serta keinginannya terhadap barang dan jasa tanpa adanya intervensi eksternal.

Berdasarkan berbagai definisi dan teori yang diuraikan, kesejahteraan dapat disimpulkan sebagai kondisi ideal di mana seseorang mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial, sehingga tercipta rasa aman, tenteram, dan makmur dalam kehidupannya. Konsep kesejahteraan mencakup dimensi material dan spiritual, di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, seperti rasa pengakuan dan aktualisasi diri di tengah masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut kebebasan, rasa aman, dan kesempatan yang memungkinkan individu berkembang secara utuh dalam kehidupan sosialnya.

2.3.1 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mencapainya dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Indikator kesejahteraan hidup seseorang banyak memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur. Menurut Suyatno dalam Medaline (2017), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya derajat kesehatan, tingginya capaian pendidikan, serta meningkatnya produktivitas masyarakat. Representasi ini mencerminkan adanya peningkatan dari pendapatan kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Medaline (2017), menyatakan bahwa sistem pelayanan sosial terorganisir yang melibatkan berbagai lembaga untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai taraf hidup dan kesehatan yang layak serta hubungan sosial yang mendukung pengembangan potensi diri mereka secara optimal sehingga kesejahteraan mereka meningkat sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial dalam beberapa sudut pandang memiliki makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Menurut Medaline (2017) kesejahteraan sosial memiliki tiga konsepsi, yaitu:

1. Sebagai kondisi kehidupan yang sejahtera, di mana kebutuhan fisik, mental, dan sosial seseorang terpenuhi;
2. Sebagai institusi atau bidang kegiatan, yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial beserta profesi-profesi kemanusiaan dalam menyelenggarakan pelayanan sosial;
3. Sebagai aktivitas, yaitu kegiatan atau usaha terorganisir yang bertujuan untuk mencapai kondisi kehidupan yang sejahtera.

2.3.2 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan oleh seseorang untuk mempertahankan kehidupan dan memperoleh kesejahteraan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidupnya. Menurut Suud dalam Darmawan & Risnawati (2020), menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi sebagai kegiatan-kegiatan bagi peningkatan ekonomi dengan melalui badan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu kesejahteraan ekonomi juga merupakan sistem pelayanan sosial yang terorganisir dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dengan tujuan membantu individu maupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup yang layak serta meningkatkan taraf kesejahteraan ekonominya (Darmawan & Risnawati, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (dalam Darmawan & Risnawati, 2020), kesejahteraan rumah tangga dapat dijadikan beberapa indikator yang digunakan untuk ukuran antara lain:

1. Pendapatan keluarga, yaitu jumlah penghasilan yang diterima dalam satu rumah tangga.
2. Pola pengeluaran rumah tangga, dengan membandingkan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non-pangan.

3. Tingkat pendidikan anggota keluarga, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga tersebut.
4. Derajat kesehatan keluarga, yang menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan.
5. Kondisi tempat tinggal, termasuk kualitas rumah serta fasilitas yang tersedia dalam rumah tangga.

Selain itu, kesejahteraan juga dapat dinilai melalui berbagai aspek kehidupan, di antaranya:

1. Kualitas hidup material, seperti kondisi rumah dan kecukupan bahan pangan.
2. Kualitas hidup fisik, mencakup kesehatan tubuh dan kondisi lingkungan sekitar.
3. Kualitas hidup mental, yang dapat dilihat dari akses terhadap pendidikan dan lingkungan budaya.
4. Kualitas hidup spiritual, seperti moral, etika, serta kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan kesejahteraan, antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi keluarga atau masyarakat, yang memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral, yaitu jenis kegiatan produksi yang menjadi dasar mata pencaharian rumah tangga atau masyarakat.
3. Potensi wilayah, seperti ketersediaan sumber daya alam, kondisi lingkungan, dan infrastruktur yang mendukung perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.3.3 Kesejahteraan Subjektif

Kesejahteraan subjektif adalah suatu fenomena yang meliputi evaluasi kognitif dan emosional individu terhadap kehidupan mereka, seperti apa yang disebut orang awam sebagai kebahagiaan, ketentraman, berfungsi penuh, dan kepuasan

hidup (Diener, 2003). Jika dalam kesejahteraan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kepuasan subjektif terhadap kehidupan (*Subjective Well-being/SWB*). Dalam konteks kesejahteraan subjektif atau *Subjective Well-being* (SWB), konsep ini menekankan pada evaluasi individu terhadap kualitas hidupnya. Menurut Diener (2003), kesejahteraan subjektif atau *Subjective Well-being* (SWB) memiliki dua aspek utama yaitu aspek afektif dan aspek kognitif.

Menurut teori SWLS (Diener, 2009) Aspek kognitif atau kepuasan hidup diukur dari penilaian individu terhadap kehidupannya secara keseluruhan berdasarkan standar pribadi mereka. Peningkatan keterampilan dan kemampuan diri dapat berkontribusi pada kepuasan hidup, karena membantu individu merasa mampu mencapai standar hidup yang mereka harapkan. Shin dan Johnson dalam Diener (2009) mendefinisikan kepuasan hidup sebagai penilaian subjektif individu terhadap kehidupannya berdasarkan standar pribadi mereka. Sementara itu, Veenhoven (2013) menyatakan bahwa kepuasan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta lingkungan tempat tinggal individu.

Diener (2009) mengembangkan Skala Kepuasan Hidup atau *Satisfaction with Life Scale* (SWLS) yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan subjektif individu berdasarkan evaluasi kognitifnya terhadap kehidupannya secara keseluruhan. Skala kepuasan hidup ini dirancang untuk menilai sejauh mana seseorang merasa puas dengan kehidupannya secara umum, bukan hanya pada aspek tertentu seperti pekerjaan atau kesehatan. SWLS (Diener, 2009).digunakan untuk mengukur kesejahteraan subjektif berdasarkan lima pernyataan evaluasi hidup. Berikut adalah lima pernyataan dalam SWLS beserta faktor *loading*-nya menurut Diener (2009) :

Tabel 3. Pernyataan *Satisfaction with Life Scale* (SWLS)

No	Pernyataan SWLS	Faktor Loading
1	Dalam banyak hal, hidup saya mendekati ideal saya	0.84
2	Kondisi kehidupan saya sangat baik	0.77
3	Saya puas dengan hidup saya.	0.83

4	Sejauh ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam hidup.	0.72
5	Jika saya bisa mengulang hidup saya, saya hampir tidak akan mengubah apa pun	0.61

Sumber: Diener, (2009)

Berdasarkan berbagai definisi dan teori yang telah diuraikan, kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar individu, baik secara material maupun non-material, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan memuaskan. Konsep kesejahteraan subjektif (*Subjective Well-being/SWB*) yang dikembangkan oleh Diener (2003, 2009) memberikan pendekatan yang relevan dalam mengukur kesejahteraan individu berdasarkan evaluasi afektif dan kognitif mereka terhadap kehidupan. Dalam konteks penelitian ini, aspek kognitif menjadi fokus utama karena lebih mencerminkan kepuasan hidup secara keseluruhan, termasuk bagaimana individu menilai kesejahteraan mereka berdasarkan standar dan harapan pribadi.

Berdasarkan uraian teori dan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama kesejahteraan, yaitu kesejahteraan subjektif, kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, sebagai dasar dalam menganalisis kondisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan subjektif mengukur bagaimana individu menilai hidupnya secara afektif dan kognitif, kesejahteraan ekonomi menekankan pada pemenuhan kebutuhan material dan pendapatan yang layak, sedangkan kesejahteraan sosial menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial melalui sistem pelayanan sosial yang terorganisir. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana skema perhutanan sosial berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani. Oleh karena itu, penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor kehutanan.

2.4 Program Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang lestari di kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat, yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mempromosikan dinamika sosial budaya. Bentuk implementasi dari Perhutanan Sosial meliputi beberapa skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan (Permen LHK No. 9 Tahun, 2021).

2.4.4 Skema Perhutanan Sosial

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, pemberian akses legal dalam pengelolaan kawasan hutan dalam skema HKm dan HD diberikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akses legal ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan. Pada skema Hutan Desa, akses legal diberikan kepada lembaga desa sebagai pemegang persetujuan pengelolaan. Sementara pada skema Hutan Kemasyarakatan, akses legal diberikan kepada individu, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Skema ini memberikan akses legal kepada kelompok tani, koperasi, atau perseorangan dalam mengelola kawasan hutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi yang belum dibebani izin (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Hutan Desa (HD) adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelolaan HD diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga desa serta menjaga kelestarian hutan. HD dapat berada di kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi, dengan syarat tidak berbenturan dengan izin atau peruntukan lain (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Perbedaan utama antara kedua skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terletak pada penerima akses legalnya. Pada skema Hutan Desa, desa menjadi pengelola utama, sedangkan pada skema Hutan Kemasyarakatan, pengelolaan hutan dilakukan oleh kelompok tani atau koperasi masyarakat. Selain itu, kawasan yang dikelola dalam skema Hutan Kemasyarakatan mencakup kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi, sementara skema Hutan Desa dapat mencakup hutan desa yang belum memiliki izin pemanfaatan (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

2.4.5 Pengelolaan dan Pemanfaatan Perhutanan Sosial

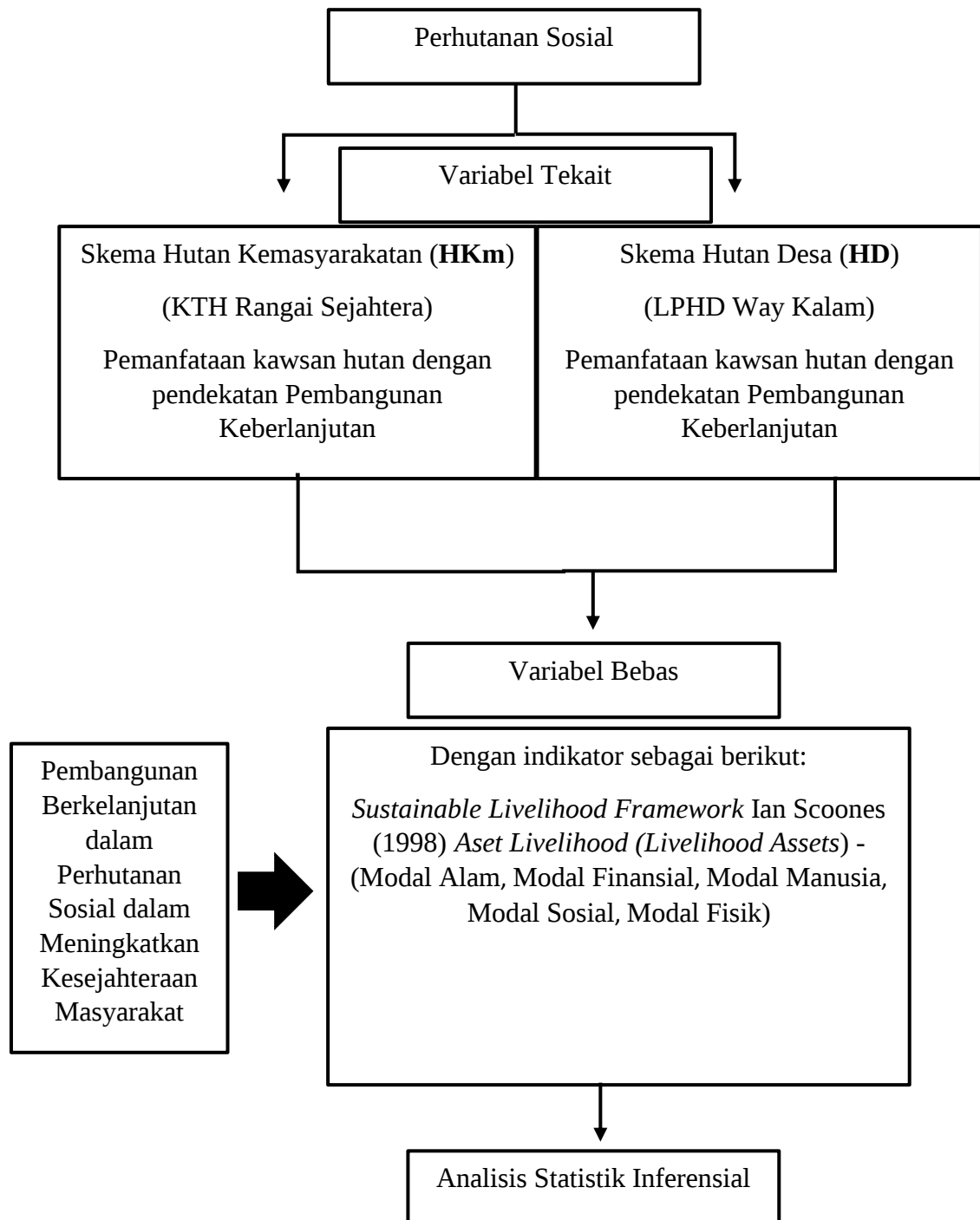
Pengelolaan Perhutanan Sosial mencakup berbagai kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok tani hutan atau lembaga desa yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan. Bentuk pemanfaatan hutan mencakup pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan bukan kayu. Tujuan dari kegiatan pemanfaatan hutan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Selain pemanfaatan hutan secara langsung, kelompok tani hutan atau lembaga desa juga didorong untuk membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai wadah untuk mengelola hasil-hasil hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha berbasis hutan. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan usaha ekonomi di kawasan hutan yang dikelola melalui skema Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

2.5 Kerangka Pikir

Program Perhutanan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Skema yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dikelola oleh kelompok tani hutan dengan fokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan pemanfaatan kayu terbatas. Hutan Desa (HD): Dikelola oleh lembaga desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan dua konsep dalam menganalisis Pembangunan Berkelanjutan dalam Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan yaitu menggunakan *Sustainable Livelihoods Framework* (Scoones, 1998) dengan mengukur kesejahteraan dari lima modal utama, Modal Alam, Modal Finansial, Modal Manusia, Modal Sosial, Modal Fisik, dengan menggunakan dan konsep kesejahteraan masyarakat menggunakan tiga jenis kesejahteraan yaitu kesejahteraan subjektif, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kedua konsep ini akan di jelaskan dalam gambar kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir
 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif, karena bertujuan membandingkan kesejahteraan anggota kelompok tani hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, serta menggunakan data numerik yang diolah secara statistik. Menurut Machali (2021) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengutamakan penggunaan angka dalam pengumpulan data, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan, serta berlandaskan pada filsafat positivisme. Oleh karena itu metode kuantitatif cocok digunakan untuk menguji hipotesis dan mengukur perbedaan signifikan dalam data numerik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan kesejahteraan antara dua kelompok dengan teknik statistik inferensial. Penelitian ini mengukur kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan menggunakan *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) dari Scoones (1998) dalam anggota kelompok tani hutan pada dua skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Selain itu, pendekatan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut.

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan pada bulan Januari 2025. Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, serta Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam

dengan skema Hutan Desa (HD) di Desa Way Kalam, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Perbedaan skema perhutanan sosial: KTH Rangai Sejahtera menggunakan skema HKm, sedangkan LPHD Way Kalam menggunakan skema HD.
2. Perbedaan aktivitas ekonomi: KTH Rangai Sejahtera berfokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan berkolaborasi dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia Green Networkm, Gojek, serta Jejak.in dalam upaya penanaman belasan ribu pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim. Pohon yang ditanam merupakan jenis Multi-Purpose Tree Species (MPTS), seperti pala, nangka, durian, alpukat, dan petai. Sementara itu, LPHD Way Kalam mengembangkan usaha ekowisata beserta produk turunannya. LPHD Way Kalam juga telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Juara 1 Wana Lestari Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 serta masuk dalam 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023).

3.3 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu panduan kuisisioner, alat tulis, kamera, perekam suara, computer/laptop, *Microsoft excel*, *software International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences* (IBM SPSS version 27). Objek pada penelitian ini yaitu petani anggota LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera.

3.4 Populasi dan Pengambilan Sample

Populasi pada penelitian ini yaitu anggota LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera yang masih aktif. Kedua KTH ini menjadi populasi dalam penelitian karena merupakan kelompok anggota yang memiliki izin dalam pengelolaan perhutanan sosial di Lampung Selatan. Metode pengambilan sampel dengan

menggunakan metode *simple random sampling* dengan masing-masing dipilih yaitu 40 responden untuk KTH Rangai Sejahtera dan 33 responden untuk LPHD Way Kalam. Hal ini dikarenakan dari keterbatasan waktu, biaya, dan lokasi penelitian yang jauh dari kota.

Tabel 4. Jumlah sample di LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera

No	Nama KTH	Jumlah Sample
1	KTH Rangai Sejahtera	40
2	LPHD Way Kalam	33
Jumlah		73

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

Populasi dalam LPHD Way Kalam berdasarkan perizinan HPHD beranggotakan 132 orang dan KTH Rangai Sejahtera berdasarkan Perizinan IUPHKm beranggotakan 409 orang. Maka berdasarkan rumus slovin didapatkan perhitungan jumlah responden sebagai berikut Arikunto dalam Dewi (2023)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N= populasi dalam penelitian

n= sample yang diambil menurut populasi

e= batas error 15%

1= bilangan konstanta

Berikut ini merupakan perhitungan untuk jumlah responden dari LPHD Way Kalam dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{132}{1 + 132 \cdot (0.15)^2}$$

$$n = \frac{132}{1 + 132 \cdot 0.0225}$$

$$n = \frac{132}{1 + 2.29}$$

$$n = \frac{132}{3.97} = 33.24 \approx 33 \text{ responden}$$

Berikut ini merupakan perhitungan untuk jumlah responden dari KTH Rangai Sejahtera dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{409}{1 + 409 \cdot (0.15)^2}$$

$$n = \frac{409}{1 + 409 \cdot 0.0225}$$

$$n = \frac{409}{1 + 9.2025}$$

$$n = \frac{409}{10.2025}$$

$$n = 40.10 \approx 40 \text{ responden}$$

Perhitungan menggunakan rumus slovin didapatkan masing masing KTH sebanyak 40 responden dan 33 responden. Menurut Sugiyono (2017) jumlah sample 30-500 sudah bisa dihitung dan layak dijadikan sebagai sample penelitian, sehingga jumlah responden yang didapat di lapangan sebesar 73 responden sudah valid dan secara statistik sudah melebihi. Selain itu dalam penggunaan Tingkat kesalahan 15% dipilih karena penelitian ini berfokus pada populasi terbatas (Way Kalam dan Rangai Sejahtera), sehingga toleransi error lebih besar masih dapat diterima. Penggunaan tingkat kesalahan yang lebih rendah (misalnya 5% atau 10%) akan membutuhkan jumlah sampel yang jauh lebih besar, yang mungkin tidak sesuai dengan keterbatasan waktu, biaya, atau lokasi penelitian. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa sampel 30-500 sudah mencukupi untuk analisis statistik, sehingga tingkat kesalahan 15% masih menghasilkan jumlah sampel yang valid secara statistik. Selain itu dalam penelitian Dewi (2023), menggunakan batas error 15% dalam perhitungan jumlah responden yang menggunakan rumus slovin.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara di lapangan. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi literatur dan sebagai data pendukung. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka.

3.5.6 Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari data tentang kondisi fisik, lingkungan, keadaan umum lokasi dan data tentang keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

3.5.7 Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam pengumpulan data dengan menggunakan panduan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas Sugiyono (2017). Kuesioner dalam penelitian ini yaitu pernyataan yang tertulis yang dipertanyakan kepada responden mengenai aspek kesejahteraan dengan anggota kelompok tani hutan program perhutanan sosial. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif maka pengumpulan data dengan kuisisioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial. Desain bentuk jawaban kuesioner untuk pengumpulan data penelitian terhadap aspek kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:
 - a) Diberi nilai 1 (Tidak Setuju) apabila Saya memiliki akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu

- b) Diberi nilai 2 (Kurang Setuju) apabila Saya memiliki akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu.
- c) Diberi nilai 3 (Setuju) apabila Saya memiliki akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu.
- d) Diberi nilai 4 (Sangat Setuju) apabila Saya memiliki akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu.

Tabel 5. Bobot Kreteria Jawaban Skala Likert

Keterangan	Arti	Angka
TS	Tidak Setuju	1
KS	Kurang Setuju	2
S	Setuju	3
SS	Sangat Setuju	4

Sumber: Sugiyono (2017)

3.6 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian kesejahteraan Kelompok Tani Hutan dan pembangunan berkelanjutan studi komparatif skema Hutan Kemasyarakatan dengan KTH Rangai Sejahtera dan Hutan Desa dengan LPHD Way Kalam di Lampung Selatan. Variabel Independen adalah skema perhutana Sosial yaitu HKM dan HD dan Variabel Dependen adalah pembangunan berkelanjutan.

3.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian kesejahteraan Kelompok Tani Hutan dan pembangunan berkelanjutan studi komparatif skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Lampung Selatan.

- 1) Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.8 Definisi Konsep dan Operasi Variabel

Definisi Konsep merupakan konsep yang menjelaskan variabel yang berasal dari teori dan sefinisi konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesamaan pandangan mengenai variabel antara peneliti dengan pembaca. Definisi oprasional merupakan definisi yang dibuat dalam berdasarkan definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel cara pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran (Manchali, 2021).

Tabel 6. Definisi Konsep

Variabel	Devinisi Konsep	Dimensi	Indikator
Pembangunan Berkelanjutan	Modal mata pencaharian (<i>Livelihood Assets</i>) merupakan komponen kunci dalam <i>Sustainable Livelihoods Framework</i> merupakan modal atau sumber daya yang digunakan individu atau komunitas untuk bertahan hidup, berkembang, dan mengatasi tantangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (Dfid, 1999) dan (Scoones, 1998a)	Modal Alam (<i>Natural Capital</i>)	Akses terhadap sumber daya hutan
		Sumber daya alam yang digunakan untuk menopang kehidupan dan ekonomi.	Kualitas lingkungan hutan
		Modal Ekonomi (<i>Financial Capital</i>)	Manfaat ekonomi dari hutan
		Sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan konsumsi sehari-hari.	Pendapatan dari hasil hutan
		Modal Manusia (<i>Human Capital</i>) Merujuk pada keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kapasitas tenaga kerja yang dimiliki oleh individu atau komunitas.	Diversifikasi sumber pendapatan
			Stabilitas pendapatan
			Pengetahuan dalam pengelolaan hutan
			Pelatihan dan pendampingan
			Keterampilan dalam pengelolaan hutan

Variabel	Devinisi Konsep	Dimensi	Indikator
		Modal Sosial (<i>Social Capital</i>) Meliputi jaringan sosial, hubungan antarindividu, norma, kepercayaan, dan institusi yang memungkinkan kolaborasi dan akses terhadap peluang ekonomi.	Dukungan dari kelompok tani Kepercayaan dan kerja sama dalam kelompok Jaringan sosial dengan pihak eksternal
		Modal Fisik (<i>Physical Capital</i>) Infrastruktur dan modal fisik yang mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Ketersediaan infrastruktur pendukung

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 6, merupakan tabel yang berisikan penjelasan devinisi konsep yang dilakukan dalam peneitian ini. Selain itu untuk mempermudah dalam melakukan penelitian peneliti juga membuat tabel oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut tabel oprasional variabel penelitian ini:

Tabel 7. Oprasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Item Jawaban
Pembangunan Berkelanjutan	Modal Alam (<i>Natural Capital</i>)	Akses terhadap sumber daya hutan	Saya memiliki akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu (HHBK).	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Kualitas lingkungan hutan	Kualitas lingkungan hutan di sekitar saya tetap terjaga dan mendukung keberlanjutan usaha saya.	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Manfaat ekonomi dari hutan	Keberadaan hutan memberikan manfaat	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Item Jawaban
Modal Ekonomi (<i>Financial Capital</i>)	Pendapatan dari hasil hutan		ekonomi bagi saya dan keluarga.	d. Sangat Setuju
			Pendapatan saya dari hasil hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Diversifikasi sumber pendapatan	Saya memiliki sumber pendapatan tambahan selain dari hasil hutan.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
	Stabilitas pendapatan		Pendapatan saya stabil sepanjang tahun dari usaha berbasis hutan.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Pengetahuan dalam pengelolaan hutan	Saya merasa memiliki cukup pengetahuan dalam mengelola hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan saya.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Pelatihan dan pendampingan	Saya pernah mengikuti pelatihan terkait usaha perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau LSM.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	Keterampilan dalam pengelolaan hutan		Saya memiliki keterampilan dalam mengelola hutan hasil dari pelatihan atau pengalaman.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Dukungan dari kelompok tani	Saya merasa didukung oleh kelompok tani dalam mengelola hasil hutan dan usaha saya di perhutanan sosial.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
		Kepercayaan dan kerja sama dalam kelompok	Saya memiliki kepercayaan tinggi terhadap anggota kelompok tani dalam bekerja sama mengelola hutan.	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
	Jaringan sosial dengan pihak eksternal		Saya memiliki hubungan baik dengan LSM/pemerintah yang membantu dalam	a. Tidak Setuju b. Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Item Jawaban
			pemasaran atau pengembangan usaha.	
	Modal Fisik	Ketersediaan infrastruktur pendukung	Infrastruktur seperti jalan, alat produksi, dan fasilitas pemasaran mendukung usaha saya.	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
			Saya memiliki akses terhadap teknologi atau alat modern yang mempermudah pengelolaan hasil hutan.	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
			Sarana transportasi yang tersedia membantu saya dalam mendistribusikan hasil hutan.	a.Tidak Setuju b.Kurang Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

3.9 Validitas dan Reliabilitas

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrument penelitian (kuesioner) benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpul relevan dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan yang sah. Menurut Sugiono (2017), validitas suatu instrumen dapat diuji dengan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment, di mana setiap item dalam kuesioner diuji hubungannya dengan total skor variabel. Jika nilai koefisien korelasi (r hitung) dari setiap item lebih besar dari nilai r tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Teknik yang bisa digunakan dalam uji validitas adalah menggunakan Pearson Product Moment, yaitu

$$r_{\text{hitung}} = \frac{n(\sum XY) - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan

r_{hitung} : Koefisien Validitas

n : Jumlah Responden

X : Skor Variabel (Jawaban responden)

Y : Skor total dari Variabel (Jawaban responden)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pembangunan berkelanjutan

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0,470	0,3120	Valid
P2	0,620	0,3120	Valid
P3	0,517	0,3120	Valid
P4	0,627	0,3120	Valid
P5	0,347	0,3120	Valid
P6	0,488	0,3120	Valid
P7	0,745	0,3120	Valid
P8	0,446	0,3120	Valid
P9	0,372	0,3120	Valid
P10	0,396	0,3120	Valid
P12	0,415	0,3120	Valid
P12	0,468	0,3120	Valid
P13	0,582	0,3120	Valid
P14	0,711	0,3120	Valid
P15	0,656	0,3120	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 8, Uji Validitas pada variabel pembangunan berkelanjutan diketahui bahwa semua item pertanyaan yang berjumlah 15 pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai r hitung lebih besar dari r-tabel sehingga instrumen diketahui **valid**.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian (kuesioner) menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas mengacu pada tingkat keandalan dan kestabilan hasil pengukuran suatu instrumen. Menurut Sugiyono (2017), uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, yang mengukur seberapa baik item-item dalam instrumen saling berkorelasi. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, semakin reliabel instrumen tersebut. Instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0.7. Perhitungan reabilitas pada penelitian ini menggunakan program IBM SPSS. Teknik pengujian rabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji rebilitas menggunakan Teknik Cronbach's Alpha, yaitu menghitung keofesian Alpha yang merupakan rata-rata dari koefisien belah dua yang dihitung untuk semua kemungkinan membelah dua item-item score, perumusannya adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

A = Reabilitas

K = Banyak butir pertanyaan

σt^2 = Variansi Total

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Variansi Butir

Tabel 9. Uji Realibilitas pada variabel Pembangunan Berkelanjutan

Jumlah pertanyaan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
15	0.814	0,7	Reliabel

Sumber: Diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan tabel 9. Hasil uji realibilitas pada variabel Pembangunan Berkelanjutan dengan sample 38 responden dan jumlah item pertanyaan sebanyak

15 pertanyaan, diperoleh nilai Cronbach's Alpha untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan instrument validitas yang digunakan **reliabel**.

3.10 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam Teknik analisis data menggunakan pendekatan statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2017) statistik inferensial, atau yang juga dikenal sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, merupakan sebuah teknik statistik yang bertujuan untuk menganalisis data sampel dengan harapan agar hasil analisis tersebut dapat diberlakukan kepada populasi secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, sampel yang diambil harus berasal dari populasi yang jelas dan terpilih secara acak, sehingga hasil yang diperoleh dari sampel dapat mencerminkan gambaran lebih besar dari populasi tersebut.

Teknik statistik inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis dari penelitian ini yaitu perbedaan yang signifikan dalam kesejahteraan anggota kelompok tani hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dibandingkan dengan skema Hutan Desa (HD) dalam program perhutanan sosial. Statistik inferensial meliputi dua jenis statistik yaitu statistik parametris dan statistik nonparametris Sugiyono (2017).

Penggunaan statistik parametris dan nonparametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu test mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi linieritas. Statistik nonparametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal.

3.10.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas data yaitu dengan metode Shapiro-Wilk Test. Shapiro-Wilk Test adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Metode Shapiro-Wilk Test dipilih untuk menguji data karena mempunyai ukuran data sample kecil ≤ 50 data. Interpretasi hasil uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut: jika $p\text{-value} > 0,05$, maka data dianggap berdistribusi normal, sehingga dapat dianalisis dengan uji parametrik. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka data dianggap tidak berdistribusi normal, sehingga perlu menggunakan uji nonparametris. Hasil dalam uji normalitas data jika berhasil menunjukkan bahwa data berdistribusi normal ($p > 0,05$ pada uji Shapiro-Wilk), maka uji-t independen (Independent Sample t-Test) digunakan untuk menguji hipotesis.

3.10.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah prosedur statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Pengujian ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat keragaman yang tidak jauh berbeda, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan menggunakan Levene's Test, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians dari dua atau lebih kelompok data bersifat homogen (sama) atau heterogen (berbeda).

Interpretasi Hasil Levene's Test: Jika $p\text{-value}$ (Sig.) > 0.05 , maka varians antar kelompok dianggap homogen, sehingga dalam uji Independent Sample t-Test digunakan *Equal Variance Assumed*. Namun jika $p\text{-value}$ (Sig.) ≤ 0.05 , maka varians antar kelompok dianggap tidak homogen, sehingga dalam uji Independent Sample t-Test digunakan *Equal Variance Not Assumed*.

3.10.3 Uji Independent Sample t-Test

Independent Sample t-Test adalah uji untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independent (Nuryadi *et al.*, 2017). Uji T independent ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu: Datanya berdistribusi normal, kedua kelompok data independen (bebas), variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik (dengan hanya 2 kelompok. Interpretasi dalam Independent Sample t-Test sebagai berikut:

- a) Untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan:

Nilai signifikansi α

Interval Confidence = $1 - \alpha$

Df (*degree of freedom*) = $N - k$, khusus untuk independent sample t-test

$df = n - 2$ atau DF (*Degree of freedom*) = $(n_1 + n_2) - 2$

- b) Bandingkan nilai t_{hit} dengan t_{tab}

- c) Apabila:

1. berbeda secara signifikansi (H_0 ditolak)
2. Tidak berbeda secara signifikansi (H_0 diterima)

3.10.4 Uji Nonparametris

Uji nonparametrik merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Menurut Ghazali (2018), uji nonparametrik disebut juga *distribution free test* karena tidak mempersyaratkan bentuk distribusi tertentu pada data yang dianalisis. Oleh karena itu, uji nonparametrik menjadi pilihan yang tepat apabila data berdistribusi tidak normal, data berskala ordinal, atau jumlah sampel penelitian relatif kecil.

Dalam penelitian ini, uji nonparametrik yang digunakan adalah Mann-Whitney U-Test. Uji Mann-Whitney U-Test merupakan alternatif dari uji Independent Sample t-Test yang berfungsi untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang tidak berpasangan. Menurut Sugiyono (2017), Mann-Whitney U-Test digunakan untuk

mengetahui apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama atau berbeda, terutama ketika data bersifat ordinal atau interval tetapi tidak terdistribusi normal.

Langkah-langkah dalam melakukan uji Mann-Whitney U-Test secara umum meliputi:

- a) Merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan terdapat perbedaan antara kedua kelompok.
- b) Menentukan tingkat signifikansi (α), yang pada penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%.
- c) Melakukan analisis uji Mann-Whitney U-Test dengan bantuan program statistik (misalnya SPSS) untuk memperoleh nilai p-value.
- d) Menginterpretasikan hasil uji, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jika nilai p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan.
 2. Sebaliknya, jika nilai p-value $> 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji Mann-Whitney U-Test digunakan sebagai metode analisis data yang tepat ketika data penelitian tidak berdistribusi normal, khususnya untuk membandingkan dua kelompok independen. Penggunaan uji ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai adanya perbedaan yang signifikan atau tidak dalam data yang bersifat ordinal atau data interval yang tidak memenuhi asumsi parametrik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pembangunan berkelanjutan antara anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua skema tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mendukung hipotesis alternatif (H_1) bahwa skema Hutan Desa memiliki keunggulan yang dapat dijelaskan melalui lima modal utama dalam *Sustainable Livelihood Framework*:

Modal Alam, LPHD Way Kalam memiliki akses legal yang lebih merata serta memanfaatkan komoditas kopi dan tanaman MPTS, yang didukung oleh jasa ekowisata sehingga memperkuat keterikatan masyarakat dengan lingkungan. Sementara itu, KTH Rangai Sejahtera berfokus pada komoditas pala untuk membangun identitas sebagai sentra pala. Modal Fisik, LPHD Way Kalam memiliki fasilitas produksi yang lebih memadai, seperti mesin pengolahan kopi dan akses transportasi yang baik, sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan efisiensi distribusi. KTH Rangai Sejahtera masih mengandalkan peralatan sederhana. Modal Finansial, Kedua skema belum sepenuhnya memberikan pendapatan yang stabil, namun LPHD Way Kalam memiliki diversifikasi sumber pendapatan, termasuk pemanfaatan rumah warga sebagai homestay untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Modal Manusia, Pelatihan dan pengembangan kapasitas di LPHD Way Kalam dilakukan secara merata karena jumlah anggota yang relatif sedikit (± 132 orang). Di sisi lain, KTH Rangai Sejahtera dengan anggota lebih banyak (± 419 orang) masih menghadapi keterbatasan akses pelatihan. Modal Sosial, LPHD Way Kalam memiliki kohesi

sosial yang kuat karena homogenitas wilayah masih dalam satu desa yang sama, mempunyai sekretariat tetap, dan tingkat kepercayaan tinggi antarkomunitas. Sementara KTH Rangai Sejahtera unggul dalam membangun jejaring eksternal melalui kolaborasi dengan NGO dan sektor swasta.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kontribusi kedua skema Perhutanan Sosial dapat dianalisis melalui aspek ekonomi, Keduanya memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman MPTS. KTH Rangai Sejahtera fokus pada hilirisasi pala melalui produksi sirup pala dan penyediaan bibit, sedangkan LPHD Way Kalam mengembangkan ekowisata (Air Terjun Way Kalam) dan produk turunan kopi, madu, serta gula semut yang memperluas sumber pendapatan masyarakat.

Aspek Sosial, kedua skema mendorong partisipasi, penguatan kelembagaan, dan solidaritas sosial. Namun, LPHD Way Kalam memiliki tata kelola kelembagaan yang lebih mapan berkat dukungan pemerintah desa dan sekretariat tetap. Aspek Lingkungan, keduanya berkomitmen melindungi hutan lindung sesuai Permen LHK No. 9 Tahun 2021. KTH Rangai Sejahtera menonjol dalam reforestasi melalui kemitraan (PILI Green Network, Gojek, Jejak.in) dengan capaian >15.000 pohon MPTS dalam dua bulan, sementara LPHD Way Kalam mengedepankan konservasi berbasis wisata dan edukasi lingkungan kepada masyarakat serta pengunjung.

Dengan demikian, perbedaan pada kelima modal penghidupan, serta variasi strategi ekonomi, sosial, dan lingkungan, menunjukkan bahwa skema HD pada LPHD Way Kalam memiliki keunggulan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, sementara skema HKm pada KTH Rangai Sejahtera menunjukkan potensi besar melalui kekuatan jejaring dan pengembangan komoditas unggulan pala.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah dan KLHK, disarankan untuk memperkuat program pelatihan lebih meraka kepada semua anggota KTH dan akses pemasaran hasil hutan bagi kedua skema, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Penguatan kapasitas masyarakat dan penggunaan teknologi pengolahan juga perlu ditingkatkan dan perlu untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha bagi kedua kelompok melalui program CSR, dana desa, atau dukungan KLHK. Selain itu juga pemerintah daerah membarikan pendampingan teknis untuk pengendalian penyakit pada tanaman terutama tanaman HHBK seperti kopi dan pala secara berkala agar produktivitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Bagi LPHD Way Kalam, disarankan untuk mengembangkan dan membuat strategi penguatan pada sektor ekowisata berbasis komunitas. Pengembangan paket wisata terpadu yang menggabungkan wisata alam, budaya, dan edukasi lingkungan akan menambah daya tarik wisatawan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga. Kompetensi pemandu wisata dan pengelola destinasi perlu ditingkatkan melalui pelatihan *hospitality* dan teknik *storytelling* yang menarik, sehingga pengalaman wisata menjadi lebih berkesan. Selain pendapatan dari tiket wisata, LPHD Way Kalam dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan mengintegrasikan penjualan produk lokal seperti kopi, gula aren, madu, dan kerajinan tangan dalam pengalaman wisata yang ditawarkan. Pemasaran berbasis daring melalui *online store* atau media sosial dapat membantu menjangkau konsumen di luar daerah. Penguatan infrastruktur seperti akses jalan, papan informasi, dan fasilitas pendukung wisata juga perlu mendapat prioritas, diiringi dengan pembentukan identitas merek desa wisata yang konsisten untuk memperkuat citra di mata publik.

3. Bagi KTH Rangai Sejahtera, disarankan untuk bagian modal alam berupa komoditas pala yang menjadi andalan perlu dikelola dengan pendekatan tata kelola yang lebih profesional. Pengurus kelompok disarankan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, manajemen keuangan, dan pengelolaan usaha melalui pelatihan manajemen yang baik. Diversifikasi produk perlu dilakukan dengan mengolah pala menjadi berbagai produk turunan seperti minyak atsiri, bubuk pala, atau olahan pangan lainnya, sehingga memperluas segmen pasar dan mengurangi risiko fluktuasi harga. Melakukan pengeaneragaman pada tanaman agroforestry dan tanaman *Multi-Purpose Tree Species* (MPTS) seperti pala, durian, alpukat, dan petai. Upaya ini bertujuan menjaga produktivitas jangka panjang, mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi digital, seperti e-commerce dan media sosial, juga penting untuk memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, kolaborasi multipihak dengan perguruan tinggi, lembaga riset, swasta, dan koperasi desa perlu diperkuat agar akses terhadap inovasi, teknologi, pembiayaan, dan distribusi produk semakin terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B., & Diniyati, D. (2018). The income structure of smallholder forest farmers in rural sumbawa, Indonesia. *Biodiversitas*, 19(3), 936–946. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d190324>
- Ayu, H. Y., Kaskoyo, H., Yuwono, S. B., Banuwa, I. S., & Safe'i, R. (2022). Penilaian Dampak Hutan Kemasyarakatan Melalui Sustainable Livelihoods Framework. *Jurnal Hutan Tropis*, 10(1), 47. <https://doi.org/10.20527/jht.v10i1.13087>
- Brundtland, G. H. (2017). Our Common Future ('The Brundtland Report'): World Commission on Environment and Development. *The Top 50 Sustainability Books*, 52–55. <https://doi.org/10.4324/9781351279086-15>
- Darmawan, D., & Risnawati. (2020). Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang. *E-Plus : Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 205–212.
- Dewi, V. P. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kph Batu Tegi)*. digilib.unila.ac.id. <http://digilib.unila.ac.id/69056/>
- Dewi, V. P. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kph Batu Tegi)*. 11.
- Dfid, (Departement for International Development). (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets Framework Introduction Vulnerability Transforming. In *Context*. <http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf%3E>
- Diener, E. (2009). Assessing Well-Being. The Collected Works of Ed Diener. *Springer*, 101–102. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4>
- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. *Annual Review of Psychology*, 54, 403–425. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056>
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024). *Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mencatat prestasi gemilang dengan meraih peringkat ketiga capaian nilai transaksi ekonomi tertinggi oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) tingkat*

- nasional tahun 2024. 10 Desember 2024.*
<https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/dinas-kehutanan-provinsi-lampung-raih-capaian-tertinggi-ketiga-dalam-nilai-transaksi-ekonomi-kelompok-tani-hutan-2024>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. (2024). *Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan peringkat 4 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan 2024 Tingkat Nasional*. 11 Desember 2024.
[https://dlhk.jatengprov.go.id/v1/provinsi-jawa-tengah-meraih-penghargaan-peringkat-4-nilai-transaksi-ekonomi-kelompok-tani-hutan-2024-tingkat-nasional/#:~:text=NTE adalah nilai rupiah yang,Hartanto%2C ST.%2C MT.](https://dlhk.jatengprov.go.id/v1/provinsi-jawa-tengah-meraih-penghargaan-peringkat-4-nilai-transaksi-ekonomi-kelompok-tani-hutan-2024-tingkat-nasional/#:~:text=NTE%20adalah%20nilai%20rupiah%20yang,Hartanto%2C%20ST.%20MT.)
- Emanuella Elma Intania Logo, Lusya Sulo Marimpan, Nixon Rammang, & Roni Haposan Sipayung. (2024). Forestry Partnership Scheme in Social Forestry Program on Forest Farmers Groups in Forest Areas With the Special Purpose of Sisimeni Sanam, Fatuleu Subdistrict, Kupang Regency. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 1312–1322.
<https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i1.440>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*.
- Goa, N. Y., Naparin, M., & Helmi, M. (2024). Pengaruh Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Di Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat. *Jurnal Sylva Scientee*, 07(1), 145–155.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/view/8313>
- Hahnel, R., & Albert, M. (1990). *Sebuah Revolusi Sunyi dalam Ekonomi Kesejahteraan*.
- Hasan, S., & Niapele, S. (2022). Implementasi Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara. *AGRIKAN - Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(2), 855–861.
<https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/agrikan/article/download/1329/981>
- Herdianti, Sarpin, Bustami, R., & Indra, citra asmara. (2022). *Peran Modal Sosial dalam Penguatan Jaringan Kelompok Tani Hutan di Desa Kapitan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka*. 10(2), 482–490.
<https://doi.org/10.33019/society.v10i2.447>
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Kantor Staff Kepresidenan. (2016). *Atasi Kemiskinan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan, Presiden Jokowi: Permudah Akses Perhutanan Sosial*. Ksp.Go.Id.
<http://ksp.go.id/atasi-kemiskinan-masyarakat-sekitar-kawasan-hutan-presiden-jokowi-permudah-akses-perhutanan-sosial/>
- Kementerian Kehutanan. (2025). *Daftar Capaian Perhutanan Sosial*. GoKUPS.
<https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>

- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & Mulyaningrum. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150–163. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif). In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Vol. 01, Issue April). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode Penelitian Kuantitatif %20Panduan Praktis Merencanakan%2C Melaksa.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%20Panduan%20Praktis%20Merencanakan%20Melaksa.pdf)
- Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 142–153.
- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Kelompok Tani Hutan. In *Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Midgley, J. (1995). *Pembangunan sosial: perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*.
- Oktalina, S. N., Suka, A. P., Bisjoe, A. R. H., Muin, N., & Race, D. (2022). Understanding social capital in management of community forest in indonesia. *Habitat*. <https://habitat.ub.ac.id/index.php/habitat/article/view/3426>
- Parliansyah, R., Riniarti, M., & Duryat, D. (2019). Kajian Produksi Tanaman Pala Di Hkm Rangai Sejahtera Kph Rajabasa. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 2(2), 120. <https://doi.org/10.32662/gjfr.v2i2.721>
- Pasolonk, B. L. H., Juniar, J. M., Maharani, M., Raviqois, R. R., & Adelia, R. P. (2023). Daya Saing Indonesia Dalam Ekspor Kopi Dunia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 624–632. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.599>
- Permen LHK No. 9 Tahun. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Putri, O. M. P., & Marasabessy, M. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Papua: Pendekatan Maqshid Syariah. *Al-Tijary*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.21093/at.v9i1.5315>
- Salim, E. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan*. 1–11.
- Scoones, I. (1998a). Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis. *IDS*

- Working Paper*, 72, 22.
http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones_1998_wp721.pdf
- Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. *IDS Working Paper*, 72, 22.
http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones_1998_wp721.pdf
- Sugiyono. (2017). *statistika untuk penelitian* (cetakan 30).
- Supriatna, A., Kurniawan Subagja, I., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(6), 429–432.
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i6.817>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140* (Vol. 19, Issue 19). [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 %28PPLH%29.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20PPLH%29.pdf)
- Veenhoven, R. (2013). *The Four Qualities of Life Ordering Concepts and Measures of the Good Life*. 195–226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5702-8_11
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). *Pentingnya Pembelajaran Sosial bagi Pengembangan Hutan Berbasis Masyarakat*.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari Kph Viii Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>